



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

**Siaran Pers**  
**27 April 2017**

**JSMP menerbitkan laporan Tahunan mengenai Pemantauan Umum Sektor Peradilan 2016, Laporan Pemantauan Parlemen 2016 & Laporan Institusional 2016 Dalam Perayaan Ulang Tahun JSMP yang ke-XVI**

Pada tanggal 28 April 2017, JSMP akan menerbitkan dua laporan tahunan penting mengenai Pemantauan Sektor Peradilan (PSP) tahun 2016, dan Laporan Pemantauan Parlemen 2016, bersama dengan Laporan Institusional JSMP untuk 2016. Pada saat yang sama JSMP juga merayakan ulang tahunnya yang ke XVI.

Kedua laporan tersebut mencakup analisa JSMP mengenai perkembangan dan tantangan-tantangan sektor peradilan termasuk proses-proses kasus di Pengadilan dan proses legislatif di Parlemen Nasional dan kejadian-kejadian yang dipantau dan dicatat oleh JSMP selama tahun 2016.

“Seperti sebuah tradisi institusional di JSMP, setiap tahun JSMP menyajikan laporan pemantauan regular mengenai perkembangan penting dan tantangan-tantangan dalam sektor peradilan dan legislatif kepada publik Timor-Leste secara umum sebagai sebuah cara untuk berkontribusi kepada pembangunan kedua sektor ini,” kata Luis de Oliveira Sampaio, Direktur Eksekutif JSMP.

Laporan Pemantauan Sektor Peradilan 2016 menyajikan analisa informasi yang dihimpun dari hasil pemantauan JSMP yang dilakukan selama tahun 2016. Laporan ini, membahas kemajuan dan tantangan sektor peradilan, termasuk statistik kasus yang disidangkan di pengadilan-pengadilan distrik dan pengadilan banding selama tahun 2016. Secara khusus laporan ini membahas kasus-kasus yang diadili di pengadilan-pengadilan distrik, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, kasus-kasus kejahatan dalam menjalankan jabatan/tugas Negara dan tindak pidana umum lainnya.

Sementara itu, Laporan Pemantauan Parlemen mencakup pembahasan mengenai informasi yang dihimpun JSMP dari hasil pemantauan JSMP selama tahun 2016 mengenai pembangunan politik dan legislatif, produktivitas legislatif, kemajuan dan tantangan Parlemen dalam proses membuat undang-undang dan ketepatan waktu para anggota parlemen baik pada sidang plenary dan di Komisi A.

Laporan lainnya adalah Laporan Institusional JSMP, menyajikan kegiatan-kegiatan JSMP selama tahun 2016 sebagai justifikasi dan bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Dalam laporan PSP, mengulas informasi terkait informasi dan bentuk-bentuk kasus dan total kasus yang dipantau selama tahun 2016. Pada tahun 2016, JSMP memantau 957

kasus, yang terdiri dari 941 kasus kriminal dan 16 kasus perdata, dimana menurun dari kasus 1166 yang dipantau JSMP pada tahun 2015.

Dari total kasus 957, terdapat 582 kasus yang melibatkan kasus-kasus kekerasan berbasis gender melawan perempuan dan anak-anak perempuan. Kasus-kasus ini mencakup 62 % dari total kasus kriminal 941 yang dipantau JSMP selama 2016, dan ini menunjukkan bahwa semua pengadilan terus mengadili banyak kasus yang melibatkan kekerasan berbasis gender, terutama ketika dibandingkan dengan kasus-kasus kriminal lainnya.

Diantara kasus-kasus yang melibatkan kekerasan berbasis gender, 421 kasus adalah kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah kasus-kasus yang didakwa oleh JPU dengan UU-AKDRT. Namun, kemungkinan besar terdapat lebih banyak kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diproses di pengadilan karena JSMP mencatat bahwa terdapat banyak kasus yang tidak diadili baik berdasarkan KUHP maupun UU-AKDRT.

Pada tahun 2016, JSMP memantau 82 kasus yang melibatkan anak, dimana mewakili 9% dari semua kasus kriminal yang dipantau JSMP. Ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak menonjol di Timor-Leste.

Kejahatan terhadap anak meliputi kekerasan fisik, emosional, kekerasan seksual dan penelantaran. Namun, mayoritas dari kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan adalah kasus kekerasan seksual. Laporan ini mengungkapkan bahwa kurang lebih 40% dari kasus yang melibatkan anak adalah kekerasan seksual. Kasus-kasus kriminal yang terkait dengan anak melibatkan korban anak perempuan (53%). Sementara 16% dari kasus yang melibatkan anak laki-laki dan 13% melibatkan anak perempuan dan laki-laki sekaligus.

Sementara itu, di Parlemen Nasional, membahas dan mengesahkan sebanyak 18 rancangan undang-undang. Dari ke-18 RUU tersebut, 13 undang-undang telah diundangkan, 3 undang-undang diamandemen, 6 adalah undang-undang baru dan 3 lainnya terkait dengan undang-undang Anggaran Belanja Negara. Sebagai perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah ini lebih tinggi dari tahun 2015 dimana PN hanya mengesahkan 10 undang-undang dan pada tahun 2014 hanya 4 undang-undang.

Undang-undang ini termasuk pengesahan terhadap UU mengenai Proses Pemberian Pengampunan dan Pengurangan Hukuman pada tahun 2016 yang merupakan sebuah langkah maju terhadap pembangunan sektor hukum di Timor-Leste dan UU Perlindungan Konsumen, UU Kelurahan dan UU lainnya.

Namun terdapat beberapa RUU yang berhubungan dengan pembangunan sektor peradilan yang tidak sempat dibahas dan disahkan. Ini termasuk RUU Anti Korupsi, yang menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas korupsi di Timor-Leste. Selain itu, terdapat juga UU lain mengenai Reparasi Korban dan Institut Memorialisasi Nasional yang tidak pernah diagendakan kembali di PN selama tahun 2016.

Kedua RUU ini sangat penting untuk mempertimbangkan perihal mengenai

memorialisasi dan juga perawatan kesehatan dan pendidikan bagi para korban. JSMP mendorong Parlemen Nasional untuk mengagendakan kembali kedua RUU tersebut untuk dibahas sesegera mungkin.

Menurut pandangan JSMP, bahwa penting bagi PN untuk membahas dan mengesahkan undang-undang tersebut bagi kepentingan warga-negara Timor-Leste. JSMP mendorong PN untuk membahas secara seksama RUU tersebut untuk menjamin perubahan yang penting bagi kedua undang-undang tersebut sebelum disahkan.

JSMP terus mendorong pembangunan terhadap sektor peradilan. JSMP mengajukan beberapa pemikiran/masukan ke PN, termasuk usulan perubahan remunerasi terhadap para aktor peradilan, Rancangan Undang-Undang Pertanahan, RRU mengenai Pencegahan dan Perdangangan Terhadap orang.

JSMP berharap bahwa fakta-fakta yang diuraikan dalam kedua laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada publik pada umumnya dan secara khusus kepada lembaga-lembaga berdaulat Negara dan institusi terkait lainnya dan dapat berkontribusi langsung dan tidak langsung untuk memperbaiki sistem peradilan formal dan legislatif di masa mendatang.

Laporan ini ditutup dengan rekomendasi-rekomendasi penting dan relevan yang ditujukan secara langsung kepada institusi kompeten dan relevan lainnya untuk dipertimbangkan.

Laporan-laporan ini dapat diakses di website JSMP [www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl); setelah diluncurkan.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio  
Direktur Eksekutif JSMP  
E-mail: [luis@jsmp.tl](mailto:luis@jsmp.tl)